

Judul : Rekomendasi Panitia Angket KPK Sarat Konflik Kepentingan
Tanggal : Kamis, 28 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 11

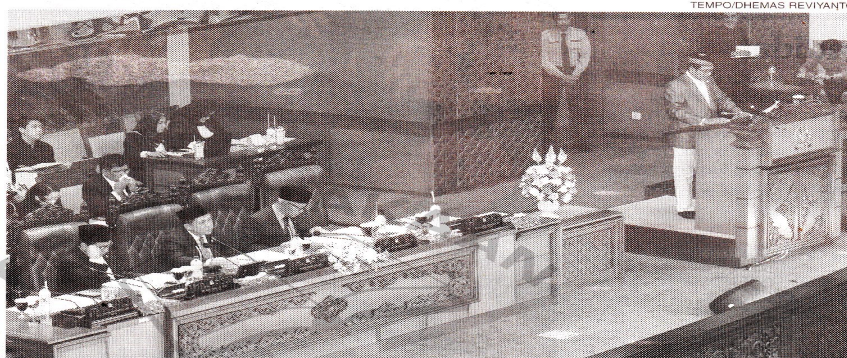
Rekomendasi Panitia Angket KPK Sarat Konflik Kepentingan

Dewan akan memanggil saksi tambahan untuk menyerang KPK.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, menilai temuan Panitia Angket KPK penuh dengan konflik kepentingan sejumlah pihak. Menurut dia, temuan panitia khusus itu adalah isu lama yang terus digunakan untuk menggerus kewenangan KPK. Ia mengatakan kinerja KPK sudah jelas dan terukur melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, kinerja KPK telah melalui forum pengawasan dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat serta putusan pidana dan praperadilan di pengadilan. Menurut Saut, DPR banyak menebar tuduhan terhadap KPK menyangkut penyadapan liar, rumah sekap, rumah penyimpanan benda sitaan negara yang buruk, sistem egaliter sumber daya manusia yang salah, pimpinan yang tak paham hukum, dan operasi tangkap tangan gaya polisi lalu lintas. "Semua tuduhan itu tak terbukti. Alangkah kasihan negeri ini," kata Saut di Jakarta, kemarin.



Ketua Panitia Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa, menyampaikan laporan hasil kerja Panitia dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa lalu.

Anggota Koalisi Save KPK, Emerson Yuntho, mengatakan rekomendasi pansus diprediksi melemahkan dan memangkas kewenangan KPK. Menurut dia, lima sektor yang diduga sudah masuk rekomendasi pansus antara lain pemangkas kewenangan penindakan, penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terhadap pegawai KPK, dan revisi UU KPK. "Skenario sejak awal sudah terlihat. Lebih baik pansus itu dibubarkan saja karena bertujuan melumpuhkan KPK," kata Emerson.

Panitia angket akan menggelar rapat perdana setelah pembacaan laporan temuan dalam rapat paripurna DPR. Dalam rapat ini, pansus akan menyusun daftar nama saksi baru

yang akan dipanggil dan diperiksa selama periode perpanjangan masa kerja panitia. "Kemarin sudah muncul banyak nama. Kami akan pilih siapa-siapa saja yang dipanggil sesuai dengan kesaksiannya," kata Wakil Ketua Panitia Angket KPK, Eddy Wijaya Kusuma, saat dihubungi, kemarin.

Ketua Panitia Angket, Agun Gunandjar, telah membacakan temuan dugaan penyelewengan KPK dalam empat aspek, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan. Seluruh temuan ini berasal dari pemeriksaan saksi dan kunjungan pansus ke sejumlah lokasi sejak Juni lalu. Beberapa lokasi yang sempat disambangi antara lain Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tempat ter-

pidana korupsi, kantor Badan Pemeriksa Keuangan, dan dua bangunan yang sempat disewa KPK sebagai rumah aman.

Pansus juga rajin memanggil saksi dari sejumlah lembaga yang kerap bekerja sama dengan KPK, yaitu Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, dan Markas Besar Kepolisian RI. Beberapa nama kontroversial juga masuk daftar saksi, yakni terpidana korupsi Muchtar Ependi dan Yulianis; saksi kasus korupsi Miko Panji Tirtayasa; belasan koruptor di Lapas Sukamiskin; mantan penyidik KPK; dan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman. ● MAYA AYU